

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pemerintah daerah mendapatkan dukungan berupa pengadaaan keuangan desa dari pemerintah pusat demi tercapainya tujuan pembangunan. Keuangan desa bersumber dari pendapatan asli desa (PAD), dana ransfer dan pendapatan lain-lain. Bantuan transfer dari pemerintah pusat berupa Alokasi Dana Desa (ADD) yang di anggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejak tahun 2015. Pemerintah memberikan anggaran sebesar 20,7 triliun pada APBN untuk alokasi dana desa pada tahun 2015, kemudian pada tahun 2016 menjadi dua kali lipat sebesar 46,9 triliun dan tahun 2017 sebesar 60 triliun (Sugiarti dan Yudianto, 2017).

Banyaknya dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah desa cenderung menimbulkan berbagai permasalahan terkait kurangnya pemahaman pengelolaan keuangan desa oleh aparatur desa. Dampaknya kinerja aparatur desa menjadi tidak efektif dan efisien (Munti, 2017). Sehingga perlunya evaluasi dan pemberdayaan aparatur pemerintah desa guna meningkatkan kinerja.

Anggaran Dana Desa tahun 2017 di Kabupaten Purworejo menyentuh angka Rp 355,9 miliar. Nominal tersebut naik cukup signifikan sekitar 27,5 % dibanding tahun 2016 yang hanya mencapai Rp 279,1 miliar yang akan dicairkan ke 469 desa yang tersebar di 16 kecamatan. Namun pada tahun 2017

sebanyak 14 kepala desa di Kabupaten Purworejo, tersangkut kasus korupsi Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut berita yang dilansir dari detikkom, kasus korupsi itu telah ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Purworejo. Kasus tersebut terindikasi melakukan tindakan *mark up* harga dan kuantitas barang pada saat melakukan realisasi program di desa. Bentuk pelanggarannya yaitu terkait masalah tata kelola, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pertanggung jawaban. Berdasarkan penuturan warga adanya kejanggalan dalam penggunaan Dana Desa seperti pembangunan infrastruktur yang tidak sesuai dengan rencana hingga hilangnya sejumlah dana yang sudah direncanakan untuk pembangunan, ada juga pembangunan yang berjalan dengan baik akan tetapi, kualitas bangunannya yang kurang sesuai dengan rencana dan harapan masyarakat, sehingga kurangnya transparansi dari pihak Pemerintah Desa kepada masyarakat di desa tersebut terkait dana yang didapatkan dan dipegunakan.

Astuty dan Fanida (2013) menyebutkan bahwa akuntabilitas merupakan pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya, sehingga pihak-pihak tersebut dapat mengevaluasi semua kegiatan yang dilakukan, bukan hanya dalam bentuk laporan keuangan namun juga terkait dengan pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Apabila dikaitkan dengan akuntabilitas alokasi dana desa maka dapat diartikan memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak lain mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan desa yang bersumber dari dana desa. Hal ini berarti aparatur desa mempunyai peran penting dalam mengelola keuangan desa

terutama dana desa dalam melaksanakan pembangunan. Permasalahannya adalah belum semua desa mampu mengelola keuangan desa dengan baik.

Desa Tasikmadu adalah salah satu desa yang berada di kecamatan Pituruh. Namun, sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki desa belum cukup memadai dari segi kualitas maupun kuantitas sehingga pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus bersinergi untuk memberikan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan penyelenggaraan serta pembangunan desa. Peran masyarakat desa pun dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan pemerintah desa sehingga masyarakat desa diharuskan berperan partisipatif dalam proses perencanaan hingga pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah desa.

Ashari (2013) menyatakan bahwa penelitian terkait ADD di Kecamatan Ancalong Kabupaten Kutai Timur belum menunjukkan hasil yang positif bagi desa. Pelaksanaan ADD belum melalui prosedur yang tepat seperti perencanaan dan pertanggungjawaban yang menyebabkan efektifitas pelaksanaan ADD masih belum menunjukkan hasil.

Abdul (2017) dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwa pengelolaan ADD pada desa Sangatta tahun 2014 berada pada kategori efektif sedangkan tahun 2015 dapat dikategorikan cukup efektif dan pada tahun 2017 berada dalam kategori tidak efektif.

Dari beberapa penelitian terdahulu pengukuran tingkat kinerja pemerintah desa hanya menyoroti dalam efektivitas. Peneliti menambahkan

salah satu cara yang digunakan untuk mengukur kualitas kinerja pemerintah desa adalah dengan menggunakan analisis *value for money*.

Menurut Mardiasmo (2002) *value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Keunggulan *value for money* adalah merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah dapat dinilai dari sisi *input*, *output* dan *outcome* secara bersama-sama. Sehingga dengan pengukuran *value for money*, organisasi dapat mengukur tingkat keekonomisan dalam alokasi sumber daya, efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan hasil yang maksimal, serta efektivitas dalam penggunaan sumber daya.

Berdasarkan pemaparan tersebut penulis tertarik untuk melakukan Penelitian Dengan Judul “Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa dengan Pendekatan *Value For Money*”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah maka peneliti merumuskan permasalahan yang akan dikaji adalah “Bagaimana Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa dengan Pendekatan *Value For Money*?”

### **C. Batasan Masalah**

Penulis membatasi masalah ini pada pengukuran kinerja pengelolaan keuangan dana desa dengan pendekatan *value for money* sebagai salah pedoman pengukuran kinerja terkait kinerja yang efisien, ekonomis dan efektif.

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kinerja Pemerintah Desa Tasikmadu ditinjau dari elemen ekonomi.
2. Untuk mengetahui kinerja Pemerintah Desa Tasikmadu ditinjau dari elemen efisiensi.
3. Untuk mengetahui kinerja Pemerintah Desa Tasikmadu ditinjau dari elemen efektivitas.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi berbagai pihak khususnya kepada Pemerintah Desa untuk melakukan pengawasan, evaluasi, dan pemberdayaan kinerja. Penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat selaku prinsipal yang merasakan dampak dari kinerja pemerintah terhadap pengelolaan keuangan desa.

## 2. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi civitas akademik dan dapat dijadikan referensi dalam pengkajian masalah kinerja pemerintah desa pengelolaan keuangan Dana Desa bagi peneliti lain agar lembaga sektor publik lebih baik dalam segala hal.

